

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Deklarasi Salamanca (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO), 1994) dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menjelaskan bahwa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) pada dasarnya mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan layaknya anak normal tanpa adanya diskriminasi. Sekolah reguler dengan orientasi pendidikan inklusif merupakan cara paling tepat untuk mencegah deskriminasi dan menjadikan masyarakat inklusif. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) secara luas didefinisikan sebagai anak yang berbeda secara signifikan dengan anak normal pada usia yang sama sehingga memerlukan layanan pendidikan khusus (Wibowo & Anjar, 2015). Perbedaan antara anak ABK dan anak normal adalah mereka memiliki disabilitas, prestasi akademik rendah, dan tidak dapat mengungkapkan bahasa dengan baik (Wade, 2000). Penyelenggaraan pendidikan inklusif sudah dimulai sejak lama bahkan tercantum dalam UUD 1945, dipertegas dan digaungkan kembali sejak adanya Deklarasi Bandung. Sejak saat itu pendidikan untuk anak - anak berkebutuhan khusus mulai berkembang. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.

dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah hak yang tidak dapat ditawar bagi setiap individu, termasuk anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Hak ini mencakup kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dari tingkat dasar hingga tingkat tinggi, sejalan dengan tujuan UUD 45 untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan memajukan kehidupan bangsa. Pratiwi (2016) memaparkan kebutuhan manusia pada umumnya mencakup kebutuhan fisiologis atau kebutuhan kesehatan, kebutuhan sosial-emosional, dan kebutuhan pendidikan.

Indonesia sendiri terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) yang diharapkan semua pihak lebih peduli dengan isu pendidikan karena pendidikan adalah hak semua orang untuk tanpa melihat atau memandang kelas, ras, suku, jenis kelamin, agama, dan fisik termasuk dengan anak berkebutuhan khusus. Mudjito (dalam Astawa, 2021) mengemukakan bahwa masih banyak anak berkebutuhan khusus di Indonesia yang belum mendapatkan haknya sesuai kebutuhannya. Anak berkebutuhan khusus ini memiliki perbedaan yang menyimpang atau signifikan dengan anak lainnya sehingga diperlukannya perhatian khusus atau bimbingan khusus, sehingga anak berkebutuhan khusus dapat mengoptimalkan bakat dan minat mereka. Penyimpangan terjadi pada aspek fisik, mental, dan juga emosi. Karena perbedaan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus ini maka adanya sekolah luar biasa sebagai wadah atau tempat untuk anak-anak dengan penyimpangan atau berkebutuhan khusus di mana pada sekolah ini terdapat guru pendamping yang membantu siswa dalam belajar.

Dalam sejarah perkembangan model pendidikan ABK, terdapat 3 pelayanan, yaitu pemisahan (*segregasi*), terpadu (*mainstream*) dan inklusif. Model pertama adalah bentuk pendidikan yang tersegregasi disebut Sekolah Luar Biasa

(SLB) model ini ditandai dengan pemisahan layanan ABK dengan anak normal. Hal ini mencerminkan pelebelan negatif pada ABK dengan siswa lainnya (David, 2019). Pelayanan pendidikan ABK mempunyai model kedua *mainstream*, yaitu suatu sistem pendidikan yang menempatkan ABK pada sekolah biasa dan mengikuti peraturan kurikulum yang berlaku. Biasanya ditargetkan pada anak-anak sakit dengan gangguan kognitif seperti epilepsi, asma, dan gangguan sensorik, serta anak-anak dengan disabilitas fisik. Widyastono (2007) mengemukakan sejak munculnya konsep *mainstream* pada tahun 1980an, sekolah negeri gencar memberikan layanan pendidikan ABK yang komprehensif. Pendidikan inklusif atau menggabungkan ABK dengan siswa “normal” dengan sekolah menyesuaikan dengan kebutuhan anak. Dilihat dari beberapa kasus banyak anak berkebutuhan khusus yang tidak bisa mengembangkan minatnya di sekolah luar biasa karena pembelajaran di sekolah luar biasa tidak sesuai dengan kemampuan peserta didik, atau ketika seharusnya siswa tersebut sudah pada fase B tetapi karena temannya masih di fase A sehingga pembelajaran akan terasa membosankan dan tidak menutup kemungkinan siswa tersebut akan mengalami kemunduran.

Pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang menggabungkan atau mengikuti sertakan semua anak tanpa memandang berkebutuhan khusus ataupun normal belajar didalam kelas yang sama. Sekolah inklusif atau sekolah reguler yang melaksanakan pembelajaran anak berkebutuhan khusus termasuk ke dalam jenis institusi pendidikan baru yang ada di Indonesia. Sekolah inklusif merupakan sekolah umum yang menggabungkan anak berkebutuhan khusus dan tidak di dalam satu kelas untuk melakukan proses belajar mengajar. Kurikulum yang diberlakukan terkadang mengikuti kurikulum umum. Pendidikan inklusif memiliki 4 model

kurikulum. Namun kenyataannya sekolah umum memilih menggunakan model kurikulum umum untuk semua anak, sehingga siswa dengan kebutuhan khusus terkadang sulit untuk mengikuti pembelajaran di dalam kelas atau lambat dalam belajar. Peleenggaraan Pendidikan inklusif ditunjukkan memenuhi target pendidikan untuk semua warga negara dan Pendidikan dasar dua belas tahun. Pendapat lain dikemukakan oleh Abdah (2020) menyatakan bahwa keuntungan penyelenggaraan Pendidikan inklusif adalah selain untuk memenuhi hak-hak asasi manusia, hak-hak anak, namun juga dapat mewujudkan kesejahteraan anak. Keberadaan anak berkebutuhan khusus atau ABK di sekolah reguler masih belum dapat diterima dengan baik oleh lingkungan sekolah. Kerap kali ABK mengalami diskriminasi karena mereka berbeda dengan siswa lain, cara mereka berkomunikasi, bermain, dan juga belajar. Salah satu ABK yang sering ditemukan di sekolah dasar adalah slow learners atau lambat belajar, di mana siswa dengan kekhususan ini memiliki IQ di bawah siswa normal berada pada akademik dengan IQ 70-90. Oleh karena itu dalam penelitian Yasa (2018) menyatakan perubahan sekolah reguler menjadi sekolah inklusif memiliki banyak kendala. Kendala yang dialami pihak sekolah sebagai penyelenggara pendidika bagi siswa ABK dituntut untuk memenuhi komponen sekolah inklusif atau sistem pembelajaran yang diselaraskan dengan kebutuhan siswa.

Pembelajaran anak berkebutuhan khusus di Bali bukanlah hal baru lagi, pada tahun 2014 Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi Bali memaparkan bahwa pendidikan inklusif mengacu pada penyelenggaraan sekolah reguler yang mengakomodasi anak normal dan anak berkebutuhan khusus (ABK). Sebanyak 94 sekolah dari tingkat dasar hingga

menengah atas dan kejuruan di Bali telah menerapkan program pendidikan inklusif atau pembelajaran bagi siswa ABK. Anak berkebutuhan khusus mempunyai kesempatan untuk dididik bersama di sekolah reguler. Mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus dengan anak normal dalam pembelajaran di kelas menjadi salah satu tantangan bagi guru terutama pada tingkat SD di mana pada tingkat TK menuju SD merupakan transisi bagi anak. Pada saat ini tes sebelum masuk sekolah dasar sudah tidak diijinkan lagi, sehingga guru tidak tahu bagaimana siswa apakah memiliki kebutuhan khusus atau tidak. Adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah bukanlah hal yang mudah. Anik (2017) memaparkan pendidikan inklusif bukan sekadar menempatkan siswa berkebutuhan khusus di kelas atau sekolah reguler, atau memasukkan sebanyak mungkin anak berkebutuhan khusus ke dalam lingkungan belajar siswa reguler. Lebih dari itu, pendidikan inklusif adalah cara guru dan teman sebaya menyambut semua siswa di kelas dan secara langsung mengakui nilai keberagaman siswa. Taman Kanak-Kanak mengalami kemajuan dalam kesadaran kelas akan keragaman siswa (Mumpuniarti, dkk., 2019). Keanekaragaman siswa di kelas harus ditempatkan dalam perspektif oleh guru dan sekolah untuk keberhasilan layanan pendidikan inklusif..

Kesiapan guru dalam mengajar siswa ABK tidak hanya saat proses pembelajaran, guru juga diharapkan dapat menyusun rancangan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa ABK. Tarnoto (2016) memaparkan sekolah dan guru kurang dalam menerapkan pendidikan inklusif. Hal ini karena pemerintah dianggap kurang dalam sosialisasi kebijakan terkait penyelenggaraan sekolah inklusif, atau kebijakan tentang sekolah inklusif sendiri tidak jelas, dan pemerintah kurang memiliki pelatihan yang dapat meningkatkan kapasitas guru. Sejalan

dengan hal tersebut Widyawati (2017) menjelaskan Dinas Pendidikan memerlukan pemantauan dan evaluasi yang cermat dan berkelanjutan terhadap implementasi rencana inklusif, terhadap program yang direncanakan sesuai dengan tujuannya. Selain itu, Dinas Pendidikan dapat membuat kebijakan perbaikan atau keputusan lebih lanjut. Pentingnya strategi mengajar dan kesediaan media, sumber, dan bahan ajar yang menunjang pembelajaran ABK perlu diperhatikan oleh sekolah. Sekolah perlu menyiapkan komponen untuk menjadi sekolah inklusif dan juga ramah anak dalam penunjang pembelajaran di dalam kelas. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kesiapan sekolah dalam penerima ABK harus memperhatikan tenaga pendidik atau pendampingan, perencanaan pembelajaran, dan juga sarana dan prasarana. Jika ditelusuri lebih lanjut komponen pemberdayaan masyarakat juga perlu diperhatikan dalam pendidikan bagi ABK di sekolah. Kesiapan sekolah dalam penerima ABK harus memperhatikan tenaga pendidik atau pendampingan, perencanaan pembelajaran, dan juga sarana dan prasarana. Dukungan masyarakat juga sangat penting bagi pelaksanaan program sekolah. Sukmawati (2018) memaparkan permasalahan pendidikan tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah dan/atau institusi sekolah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat (orang tua, keluarga/wali, masyarakat luas) untuk mengatasi permasalahan pendidikan inklusif dan melaksanakan program pendidikan.

Realitanya penyelenggaraan pendidikan bagi siswa ABK di Kabupaten Jembrana masih dianggap asing bagi beberapa masyarakat, dalam beberapa fenomena masyarakat belum dapat menerima anak berkebutuhan khusus bersekolah dengan siswa lain di sekolah reguler. Di gugus I Nakula contohnya,

pendidikan bagi ABK masih dianggap tabu. Masyarakat beranggapan anak berkebutuhan khusus harus bersekolah di sekolah luar biasa (SLB), bukan di sekolah reguler. Masyarakat menyatakan ABK tidak cocok belajar dengan siswa lain karena dianggap tidak bisa mengikuti pembelajaran, dan menghambat pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil observasi ketika mengikuti Kampus Mengajar angkatan 4 dan juga wawancara dengan guru dan kepala sekolah tentang pendidikan inklusif terdapat 5 sekolah di gugus I Nakula yang memiliki ABK.

Berdasarkan hasil temuan awal yang sudah dipaparkan maka diperlukan evaluasi guna mengetahui seberapa jauh keberlangsungan pembelajaran bagi siswa ABK di sekolah regular Kabupaten Jember. Evaluasi adalah bagian wajib dari program. Evaluasi dilakukan untuk pengumpulan informasi dari kegiatan penilaiannya kesinambungan program, kendala-kendala yang ditemui dalam program, dan masukan-masukan yang diperoleh untuk kelanjutan program. Evaluasi adalah suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi untuk menentukan tingkat keberhasilan penerapan pendidikan inklusif dan mendasarkan keputusan pada kriteria tertentu yang telah ditentukan (Kustawan, 2012). Pelaksanaan program pembelajaran bagi siswa ABK di sekolah dasar regular atau sekolah inklusif yang merupakan bagian dari sistem pendidikan dapat dilakukan dengan pendekatan sistem untuk mengidentifikasi komponen CIPP (*context, input, process, product*). Kebaruan dari penelitian ini adalah pendidikan evaluasi yang dilaksanakan di sekolah dasar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan analisis dalam latar belakang dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi yaitu;

- 1) Perlunya peningkatan kompetensi guru dalam mengajar ABK,
- 2) Kurangnya kesiapan sekolah dalam penerimaan ABK,
- 3) Anak berkebutuhan khusus dianggap susah untuk dibelajarkan di dalam kelas bersama siswa lain,
- 4) Perlunya keterlibatan dinas pendidikan dan dinas kesehatan dalam pemahaman karakter siswa.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut penelitian ini memiliki batasan permasalahan yang dimaksud untuk memberi gambaran yang jelas berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini adalah;

- 1) Penelitian ini hanya mengevaluasi penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada sekolah reguler di gugus I Nakula Kabupaten Jembrana,
- 2) Evaluasi penyelenggaraan kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus menggunakan evaluasi model CIPP (*context, input, process, dan product*).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut,

- 1) Bagaimana *context* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana?
- 2) Bagaimana *input* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana?
- 3) Bagaimana *process* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana?
- 4) Bagaimana *product* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang sudah dipaparkan maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dari evaluasi pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana.

- 1) Mendeskripsikan bagaimana *context* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana.
- 2) Mendeskripsikan bagaimana *input* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana

- 3) Mendeskripsikan bagaimana *process* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana
- 4) Mendeskripsikan bagaimana *product* dalam penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di SD reguler gugus I Nakula Kabupaten Jembrana.

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa bermanfaat secara teoretis dan secara praktis.

1) Manfaat Teoretis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai landasan teori atau sumber bacaan dalam penelitian sejenis. Selain itu, bisa digunakan sebagai sumber bacaan dalam melakukan sebuah inovasi dalam pembelajaran. Manfaat penelitian ini juga untuk memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis, mengatasi keterbatasan waktu, tenaga, dan daya indera.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini memiliki beberapa manfaat sebagai berikut.

a. Untuk Siswa

Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu siswa berkebutuhan khusus dapat belajar dengan baik dan siswa berkebutuhan khusus dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan bakat dan minat.

b. Untuk Guru

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi inovasi baru yang digunakan oleh guru sebagai saran dan masukan dalam mengajar siswa ABK dalam proses pembelajaran, sehingga pembelajaran semakin menarik dan menyenangkan bagi semua siswa.

c. Untuk Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai sumber atau referensi oleh peneliti lain dalam mengembangkan inovasi mengajar siswa ABK.

